

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang tercermin dari kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting untuk meningkatkan kemampuan produksi, meningkatkan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menuju pembangunan ekonomi yang efektif dan efisien, sehingga perlu adanya pengembangan pengembangan dibidang faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tercapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dapat mencegah dan mengendalikan tingkat inflasi dan stabilnya kurs mata uang asing. Pertumbuhan ekonomi diyakini memiliki pengaruh terhadap penurunan jumlah kemiskinan. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah tinggi maka hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kegiatan produksi barang dan jasa, maka pendapatan masyarakat akan meningkat sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. "Kehidupan yang serba lebih baik" tersebut bertolak dari tiga nilai pokok, yaitu: Pertama, peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok. Kedua, peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan. Ketiga, perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan

membebaskan mereka dari belitkan sikap menghamba dan ketergantungan kepada negara-bangsa lain.(Todaro, 2003).

Kabupaten Halmahera Selatan, merupakan salah satu dari 10 kabupaten/kota. yang ada di Maluku Utara. Yang terbentuk atas diberlakukannya kebijakan otonomi daerah.oleh karena itu pula, kabupaten Halmahera selatan dapat di katakana kabupaten yang baru, karena kabupaten ini di resmikan pada tahun 2003. Perkembangan ekonomi wilayah yang terjadi terhadap pertambahan pendapatan masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan dalam perkembanganya terjadi perubahan yang cukup baik ini digambarkan melalui hasil produksi yang dicapai oleh masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Halmahera Selatan sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk yang ada, namun dalam kenyataanya belum dikelola secara efektif dan efisien. Kondisi inilah membutuhkan suatu kebijakan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam serta sumberdaya manusia yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui perekonomian suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik secara nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Pertumbuhan ekonomi dicerminkan dari adanya perubahan PDRB dari satu periode ke periode berikutnya, yang merupakan salah satu petunjuk nyata pembangunan suatu daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan daerah. Upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi makro yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan-kegiatan produktif untuk pelaku ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Selatan yang di ukur dengan pertumbuhan PDRB dan presentase pertumbuhan ekonomi periode 2013-2022.

Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2013-2022

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)
2013	2.727.948,2	6,45
3014	2.908.533,9	6,62
2015	3.064.246,29	5,35
2016	3.238.569,07	5,69
2017	3.758.574,89	16,06
2018	4.338.828,8	15,44
2019	4.865.856,07	12,15
2020	5.723.961,08	17,64
2021	6.539.081,91	14,24
2022	7.934.612,03	21,34

Sumber: BPS Halmahera Selatan. Diolah tahun 2024

Dari tabel 1.1. diatas dapat dilihat tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2013 sebesar 6,45 persen, kemudian pada tahun 2014 sebesar 6,62 persen, kemudian pada tahun 2015 tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33 persen, kemudian 5,69 persen di tahun 2016, kemudian di tahun 2017 sebesar 16,06 persen, kemudian pada tahun 2018 sebesar 15,44 pesen, dan pada tahun 2019 sebesar 12,15 persen, kemudian di tahun 2020 sebesar 17,64 persen, pada tahun 2021 sebesar 14,24 persen dan pada tahun 2022 tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 21,34 persen

Boediono (2007) Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan “output perkapita”. Dalam pengertian ini teori tersebut harus mencangkup teori mengenai pertumbuhan GDP dan teori teori mengenai pertumbuhan penduduk. Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bisa di jelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan yang meningkat.

Inflasi dipandang sebagai salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, ada berbagai pandangan mengenai dampak

inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi antara lain pada tahun 1958, Philips menyatakan bahwa inflasi yang tinggi secara positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan menurunkan tingkat pengangguran. Pendapat tersebut juga didukung oleh para tokoh perspektif struktural dan keynesian yang percaya bahwa inflasi tidak berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi sedangkan pandangan monetarist berpendapat bahwa inflasi berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi. Inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat stabilitas perekonomian suatu daerah dengan melihat perubahan harga barang/jasa yang umum dikonsumsi masyarakat. Tingkat inflasi secara umum menunjukkan daya beli masyarakat. Kenaikan angka inflasi berarti semakin rendah nilai uang yang artinya semakin menurunnya daya beli masyarakat. Penghitungan angka inflasi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) hanya di kota-kota besar, dimana pada kota-kota tersebut terdapat Kantor Cabang Bank Indonesia. Akan tetapi sejak tahun 2016, BPS Kabupaten Halmahera Selatan melakukan penghitungan inflasi pedesaan di Halmahera Selatan.

Selama tahun 2019, secara umum Kabupaten Halmahera Selatan mengalami inflasi yang cukup signifikan pada bulan Mei. Angka inflasi pada bulan Juli sebesar tiga persen dan deflasi tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 2,32 persen. Bulan Mei memiliki angka inflasi tertinggi, hal ini kemungkinan terjadi pada saat bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri di Halmahera Selatan terutama inflasi pada bahan makanan.

**Tabel 1.2. Tingkat Inflasi Di Kabupaten Halmahera Selatan
Periode 2013-2022**

Tahun	Presentase Inflai Halmahera Selatan (%)
2013	-6,64
2014	3,37
2015	18,14
2016	15,21
2017	1,09
2018	-6,61
2019	-0,92
2020	33,28
2021	6,38
2022	-19,78

Sumber : BPS Halmahera Selatan. Diolah tahun 2024

Pada tabel 1.2. diatas dapat dilihat bahwa inflasi di Kabupaten Halmahera Selatan setiap tahunnya mengalami perubahan, pada tabel di atas dapat dilihat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan presentase sebesar 33,28 persen, sedangkan inflasi terendah terjadi pada tahun 2019 dengan presentase sebesar -0,92. Inflasi pada dasarnya mencerminkan tidak seimbangnya antara penawaran dan permintaan dalam perekonomian nasional. Meskipun ada beberapa inflasi yang dianggap wajar dalam ekonomi, kenaikan harga yang terlalu tinggi dapat merusak daya beli konsumen, mengacaukan alokasi sumber daya, dan membuat perencanaan ekonomi menjadi tidak pasti (Fadilla & Purnamasari, 2021). Selain itu, inflasi juga bisa mempengaruhi kebijakan fiskal dan moneter suatu negara, yang perlu diatur dengan bijak untuk menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang.

Pertumbuhan ekonomi, di sisi lain, mencerminkan ekspansi dari hasil produksi ekonomi suatu negara atau wilayah dalam waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang berlangsung secara terus-menerus dapat memberikan manfaat seperti peningkatan lapangan kerja, peningkatan pendapatan per kapita, serta peluang investasi yang lebih besar. Namun, pertumbuhan ekonomi juga dapat menimbulkan tantangan, terutama terkait dengan distribusi kekayaan yang adil,

dampak lingkungan (Khabibi, et al, 2020), dan ketidaksetaraan sosial (Purba, 2020).

Penting untuk memahami bahwa inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak terpisahkan dalam konteks ekonomi global. Kenaikan pertumbuhan ekonomi seringkali dapat memicu inflasi akibat peningkatan permintaan yang melampaui penawaran, sementara kebijakan untuk mengendalikan inflasi terkadang dapat membawa dampak pada laju pertumbuhan ekonomi (Wiriani & Mukarramah, 2020). Oleh karena itu, perlunya mencapai keseimbangan yang tepat antara inflasi yang terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menjadi prioritas dalam kerangka pembangunan ekonomi yang kokoh.

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia, terutama negara sedang berkembang. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara mana pun. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri dan rasa dihormati seperti orang lain. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan bersifat multidimensional, artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara (Malut) mencatat, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) pada 2020 mengalami kenaikan mencapai 12,41 ribu atau 5,21 persen dari penduduk sebanyak 252.357 jiwa. Kepala BPS Malut, Aidil Adha, di Ternate, Selasa, mengatakan, Indeks Kedalaman Kemiskinan 0,45 persen dan Indeks Keparahan Kemiskinan pada 2013 – 2020 terdapat 0,08 persen. "Pada 2019 jumlah penduduk miskin di kabupaten Halsel mencapai 11,79 (ribu) atau 5,03 persen. Jumlah ini mengalami kenaikan pada 2020 sebanyak 12,41 (ribu) atau 5,21 persen dari jumlah penduduk sebanyak 252.357 jiwa," ujarnya. Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara periode 2013 – 2022. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3. Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Di Provinsi Maluku Utara Periode 2013 – 2022

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2013	12,9	6,04
2014	12,7	5,87
2015	10,09	4,61
2016	9,06	4,11
2017	9,25	4,1
2018	11,01	4,8
2019	11,79	5,03
2020	12,41	5,21
2021	12,24	5,19
2022	12,23	4,99

Sumber: BPS Halmahera Selatan. Diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Selatan tiap tahunnya mengalami perubahan jumlah. Angka jumlah penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 12,41 ribu jiwa dengan persentase penduduk miskin sebesar 5,21%, sedangkan jumlah penduduk miskin terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 9,06 ribu jiwa dengan persentase penduduk miskin sebesar 4,11%. Sejumlah faktor yang memicu banyak sedikitnya kemiskinan di satu daerah, seperti tingginya jumlah penduduk yang menempati

daerah tersebut. Pertumbuhan penduduk begitu cepat, cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin, dengan membatasi anggaran pemerintah menjadikan mereka tidak bisa memiliki lahan dan alat produksi sendiri.

Menurut World Bank (2004) salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (lack of income and assets) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (acceptable). Disamping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (the poor) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemiskinan Berkaitan dengan kondisi fisik yang dicirikan dengan ketidakcukupan yang artinya mencukupi kebutuhan pokok yang rendah sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan tercipta karena berkurangnya pendapatan masyarakat secara riil Masyarakat umumnya mengalami penurunan daya beli terhadap kebutuhan pokok. Akibatnya, masyarakat tidak dapat hidup dengan layak, sehingga taraf hidup mereka turun.

Kebijakan anggaran menunjukkan keberpihakannya pada penduduk miskin, karena jika tidak ada kebijakan tersebut maka upaya dalam menjalankan penanggulangan kemiskinan tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari itu dibutuhkan suatu pendekatan agar dapat mengukur hubungan antara kebijakan fiskal sebagai langkah untuk menurunkan kemiskinan (Andrew, 2000). Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul sebagai berikut : “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Halmahera Selatan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Selatan ?
2. Seberapa besar pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Selatan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Selatan
2. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Selatan

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak, yaitu antara lain :

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun Ternate.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan dalam menetapkan kebijakan pembangunan daerah khususnya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih adil dan merata.
3. Memberikan referensi bagi pembaca dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.